

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia Bogor 2008  
-----, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence, Kencana Prenada Media Group Jakarta 2010.
- Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar, Renggang Education, Yogyakarta, 2013
- Anwar, Yesmil dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran 2009
- Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group 2011
- Agus Fadillah, Makalah, Kewajiban Negara dalam Pelaksanaan HAM, Makassar, 2011
- Aswanto, Hukum dan Kekuasaan; Relasi Hukum, Politik dan Pemilu, Renggang Education, Yogyakarta 2012  
-----Makalah; Aplikasi Instrument Internasional Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Simposium Nasional Hukum dan Kriminologi; Universitas Hasanuddin dan MAHUPIKI, Makassar 2013
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta 2011
- Elsam, Kompilasi Instrumen Hak asasi Manusia, Bahan Diklat HAM di Jayapura, 25-29 April 2011
- Marwan Effendy, Kejaksaaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005  
-----, Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Referensi Jakarta 2012

Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Kencana Prenada Group Jakarta 2012;

M. Yahya Harahap; Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika Jakarta 2006

Irwansyah, Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2012

M.Said Karim, Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2012.

Frans Leimena, dkk; Halangan dan Tantangan dalam Pengarusutamaan HAM dalam Administrasi Peradilan di Papua; Simposium Hukum; Jayapura, 29 April 2011

Suhrawardi K Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika Jakarta 2012

Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers PT Rajagrafindo Persada Jakarta 2010

Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Penerbit Undip, Semarang, 1997

-----Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat; PT Refika Aditama, Bandung 2009

Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Alumni, Bandung, 2003

Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Pedoman Penulisan Tesis dan Desertasi, Edisi 4, 2006

E. A. Pamungkas, Peradilan Sesat, Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia, Navila Idea, Yogyakarta 2010

H.M. Soerya Respationo, Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa Vol. 18 Nomor 4 Desember 2010.

Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah; Genta Publishing, Yogyakarta, 2010

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada Jakarta 2011

J. E. Sahetapy, E, Runtuhnya Etik Hukum, Kompas 2009;

Harifin A. Tumpa; Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia, Kencana Prenada Media Group 2010

Sudarsono; Kamus Hukum, Rineka Cipta 2007

**Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya, Media Centre, 2010

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang RI Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum. Kejaksaan, akarta, 2001

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-036/A/J.A/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-013/J.A/8/1982 tentang Faktor-faktor yang Harus Diperhatikan Pada Tahap Pra Penuntutan

Surat JAM PIDUM Nomor B-401/E/1993 tentang Pelaksanaan Tugas Pra Penuntutan